

Media Online	Rakyat Sulsel
Tanggal	Selasa, 27 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Luwu



Pemkab Luwu Raih WTP ke-10, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah



MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Pemerintah Kabupaten Luwu kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut sejak 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag, di Kantor BPK Sulsel, Jl. AP Pettarani, Makassar, Selasa (27/5).

Turut hadir Ketua DPRD Luwu Ahmad Gazali, SE. Bupati Luwu menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, yang menurutnya merupakan bukti nyata sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. “Raihan WTP ke-10 ini adalah hasil kerja keras semua pihak, terutama jajaran BKAD Luwu di bawah bimbingan Bapak Sekda. Ini bukan hanya sekadar penghargaan, tapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Patahudding. Ia juga menekankan bahwa opini WTP ini menunjukkan pelayanan publik yang berjalan baik dan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Kepala BPK Sulsel, Winner Franky, menegaskan bahwa pemberian opini WTP bukan sekadar simbol prestasi, tetapi mencerminkan kepatuhan terhadap empat kriteria utama pemeriksaan keuangan, yakni: Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kecukupan pengungkapan informasi, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Efektivitas sistem pengendalian intern. Menurut Winner, BPK telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci, untuk memastikan laporan keuangan disusun secara objektif, transparan, dan akuntabel. “Semua temuan sudah dikomunikasikan kepada kepala daerah dan perangkat terkait. Maka saat laporan diserahkan, tak ada lagi informasi yang tertinggal atau keberatan,” jelasnya. Winner juga mengingatkan bahwa tanggung jawab penuh atas laporan keuangan berada di tangan kepala daerah, yang wajib memastikan sistem tata kelola keuangan berjalan optimal. Meski banyak daerah masih menghadapi persoalan seperti pengelolaan aset yang lemah hingga penganggaran yang tidak tertib, beberapa daerah termasuk Kabupaten Luwu dinilai berhasil menjaga integritas dan kualitas laporan keuangan. “Kami berharap hasil pemeriksaan ini menjadi refleksi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan pelayanan publik,” pungkas Winner. (Irmus)